



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Sekretariat Kabinet

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum membantu tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan dukungan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020.

LKj disusun untuk menyampaikan informasi terkait pencapaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang transparan dan akuntabel. Penyusunan LKj berlandaskan pada Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024. Selama tahun 2022, secara umum Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dapat mencapai sasaran strategis dengan baik di tengah pandemi Covid-19 meskipun terdapat tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dan masukan dalam pelaksanaan kinerja agar dapat meningkatkan kinerja yang akuntabel di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2023
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan
Pekerjaan Umum,



Hennie Ambar Susilowati

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
BAB I Pendahuluan.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
C. Analisa SWOT.....	10
BAB II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	11
B. Rencana Kerja dan Anggaran	13
C. Uraian Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	19
A. Capaian Kinerja	19
1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.....	23
2. Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.....	27
3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.....	29
4. Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.....	30
5. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	31
6. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	31
B. Realisasi Anggaran	31
C. Evaluasi Kinerja	34
BAB IV Kesimpulan	35
Lampiran I : Matriks Capaian Kinerja	36
Lampiran II : Matriks Kinerja Anggaran.....	38
Lampiran III : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022	39
FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI NOMOR 4 TAHUN 2018	40

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA SESUAI
MEMORANDUM DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI NOMOR: M.513/ADM/11/2019
TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET, ESELON I
DAN ESELON II TAHUN 2019 41**

Daftar Tabel

Tabel 1 : Aspek Strategis Berdasarkan Renstra 2020-2024.....	7
Tabel 2 : Informasi Perubahan SDM.....	9
Tabel 3 : Matriks SWOT.....	10
Tabel 4 : Target Kinerja Renstra 2020-2024.....	12
Tabel 5 : Matriks Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022 Berdasarkan Renstra 2020-2024	13
Tabel 6 : Perbandingan Anggaran TA 2022.....	15
Tabel 7 : Persandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022.....	16
Tabel 8 : Uraian Perjanjian Kinerja dan Anggaran.....	18
Tabel 9 : Matriks Capaian Kinerja.....	19
Tabel 10 : Matriks Capaian IRO TA 2022.....	20
Tabel 11 : Matriks Rekomendasi IRO 1.....	23
Tabel 12 : Matriks IRO 2.....	28
Tabel 13 : Matriks IRO 3.....	29
Tabel 14 : Matriks IRO 4.....	30
Tabel 15 : Matriks Realisasi Anggaran.....	32
Tabel 16 : Matriks Evaluasi Kinerja.....	34

Daftar Gambar

Gambar 1 : Tangkapan Layar Dashboard SIKT	22
Gambar 2 : Tren Persentase Realisasi Anggaran	33

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Pengguna Anggaran diminta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Dalam laporan tersebut menyajikan ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN.

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Kabinet juga wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran. Laporan Kinerja dimaksud kemudian disampaikan kepada pimpinan unit organisasi sebagai bahan penyusunan tingkat unit organisasi.

Laporan kinerja tahunan ini akan menyajikan ringkasan tentang keluaran (output) dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam pelaksanaan APBN. Laporan tersebut paling sedikit berisi:

- a. Pencapaian tujuan dan Sasaran;
- b. Realisasi pencapaian target Kinerja;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
- d. Perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan unit kerja Eselon II dibawah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang memiliki tanggungjawab untuk membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.

Berlandaskan hal tersebut diatas, mengingat posisi yang strategis tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum memiliki andil dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada pimpinan. Gambaran lebih detail terkait aspek strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 1 : Aspek Strategis Berdasarkan Renstra 2020-2024

Aspek Strategis	Berdasarkan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024
Visi	Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang adaptif, inovatif, dan profesional dalam membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi kinerja seluruh pejabat dan staf berdasarkan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diukur beban kerja masing-masing pejabat dan staf; 2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain seperti pembangunan <i>database</i> internal; 3. Meningkatkan koordinasi dan <i>networking</i> khususnya dengan K/L mitra utama dan K/L pendukung dan pemerintah daerah dengan variasi tingkatan yang beragam; serta 4. Mengutamakan koordinasi yang baik dan lancar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keasdepan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum 2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Terkait aspek sumber daya manusia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bidang, yaitu 2 untuk sektor perhubungan dan 1 untuk sektor pekerjaan umum. Kemudian, masing-masing kepala bidang dibantu oleh kepala subbidang dan analis.

Selama tahun 2022, tidak terdapat perubahan sumber daya manusia pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum, hanya terdapat perubahan pangkat/golongan pada beberapa pejabat/pegawai sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 2 : Informasi Perubahan SDM

No.	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat/Golongan Lama	Pangkat/Golongan Baru
1	Romi Fajar Ali, S.H., M.H.	198804242010121006	Kepala Subbidang Perhubungan Darat	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)
2	Manda Kumoro Saraswati, S.E.	199102052015022001	Kepala Subbidang Perhubungan Udara	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)
3	Muhammad Eky Marzuki, S.E.	198902092015021001	Kepala Subbidang Perumahan dan Permukiman	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)
4	Hami Prabowo, S.E.	199302132018011001	Analisis Perekonomian pada Subbidang Pekerjaan Umum	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)
5	Winarsih Herafni, S.E.	198911072018012001	Analisis Perekonomian pada Subbidang Perhubungan Darat	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)

C. Analisa SWOT

Tabel 3 : Matriks SWOT

Internal		Eksternal	
Strength	Weakness	Opportunities	Threats
Sebagai bagian dari unit kerja yang bertanggungjawab sebagai manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum memiliki kekhususan dalam menangani persoalan yang berhubungan dengan bidang perhubungan dan pekerjaan umum;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data yang sangat besar 2. Jumlah staf yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 	Presiden menaruh perhatian dalam penyelesaian pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia	Beragamnya permasalahan dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia membutuhkan pemahaman yang mendalam

BAB II
Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Sebagai unit kerja Eselon II di bawah pimpinan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga memiliki kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional¹ antara lain mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Lebih lanjut Renstra Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum tahun 2020-2024 disusun berpedoman dan diarahkan untuk mendukung perwujudan visi Presiden, 7 (tujuh) misi pembangunan, dan agenda prioritas Kabinet Indonesia Maju yang kemudian dikenal dengan "Nawacita".

Renstra Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan serta lebih menitikberatkan pada hasil daripada kegiatan administrasi dan output.

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 4 : Target Kinerja Renstra 2020-2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
		2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
		4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum, terdapat beberapa target kinerja dan anggaran yang direncanakan khususnya pada tahun 2022.

Tabel 5 : Matriks Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022 Berdasarkan Renstra 2020-2024

URAIAN	TARGET KINERJA	TARGET PENDANAAN
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum		823.998.000
Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)		823.998.000
Kegiatan 1		
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407)		670.527.000
Sasaran Kegiatan 1		
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi		670.527.000
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1		
<i>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	93%	
<i>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	93%	
KRO 1		
ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	27 rekomendasi kebijakan	670.527.000
RO 1		

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	TARGET KINERJA	TARGET PENDANAAN
001 Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	27 rekomendasi kebijakan	670.527.000
<i>Indikator RO 1</i>		
<i>Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	27 rekomendasi kebijakan	
Komponen		
507 a. Pengumpulan Data	31 Laporan	251.749.000
508 b. Analisis penyusunan rekomendasi	11 Laporan	418.778.000
509 c. Perumusan dan penyusunan rekomendasi	0 Laporan	0
Kegiatan 2		
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)		153.471.000
Sasaran Kegiatan 2		
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi		153.471.000
<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2</i>		
<i>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	93%	
<i>2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	93%	
KRO 2		

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN		TARGET KINERJA	TARGET PENDANAAN
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8 rekomendasi kebijakan	153.471.000
	RO 2		
001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	8 rekomendasi kebijakan	153.471.000
	Indikator RO 2		
	<i>Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	8 rekomendasi kebijakan	
	Komponen		
	519 a. Pengumpulan Data	13 Laporan	126.393.000
	520 b. Analisis penyusunan rekomendasi	2 Laporan	27.078.000
	521 c. Perumusan dan penyusunan rekomendasi	0 Laporan	0

Berdasarkan dokumen tersebut dan Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum TA 2022, terdapat perubahan besaran anggaran yang disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 6 : Perbandingan Anggaran TA 2022

No.	Rincian Output	Anggaran Sesuai Rencana Strategis	Anggaran Sesuai DIPA TA 2022	Perubahan
1	Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp670.527.000,00	Rp462.155.000,00	-31,08%
2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp153.471.000,00	Rp437.845.000,00	+185,29%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Rincian Output	Anggaran Sesuai Rencana Strategis	Anggaran Sesuai DIPA TA 2022	Perubahan
	TOTAL	Rp823.998.000,00	Rp900.000.000,00	+9,22%

C. Uraian Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

Penetapan perjanjian kinerja ditujukan kepada setiap unit organisasi agar dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian-capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target tertentu, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Sebagai langkah konkrit dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP khususnya dalam hal perbaikan perencanaan kinerja, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum berpartisipasi aktif dalam mengawal tindak lanjut hasil evaluasi yang diberikan oleh KemenpanRB terkait penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja.

Penyempurnaan yang dilakukan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Rumusan sasaran pada setiap level Eselon II diubah menjadi lebih spesifik sesuai lingkup/bidang yang ditangani karena lingkup tanggung jawab Asisten Deputi terbatas pada bidang nomenklaturnya dan akan lebih memperlihatkan peran kontribusi setiap Asisten Deputi dalam menyokong kinerja atasannya;
2. Rumusan indikator kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja ditambahkan dengan rumusan “sesuai ketentuan”. Hal ini untuk dapat memperlihatkan objektivitas yang tinggi dari suatu pengukuran kinerja;
3. Penambahan 2 (dua) indikator kinerja baru yaitu indikator kinerja terkait indeks revisi anggaran dan indikator penyerapan anggaran. Adanya penambahan 2 (dua) indikator baru tersebut untuk lebih menunjukkan komitmen Asisten Deputi dalam hal perbaikan pengelolaan internal khususnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang efektif.

Dengan adanya penyempurnaan tersebut, berikut perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 beserta targetnya:

Tabel 7 : Persandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2021		Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (91%)	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2021		Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (91%)		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (91%)	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (91%)		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
		Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum (B) Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum (90%)

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 8 : Uraian Perjanjian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	Rp462.155.000,00
	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	Rp437.845.000,00
	4. Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Tabel 9 : Matriks Capaian Kinerja

Program	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)		
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407) 2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408) 		
Sasaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 		
Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,53%
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,53%
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang	93 %	100 %	107,53%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 %	100 %	107,53%
5. Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	B (5-8 kali revisi)	A (2 kali revisi)	
6. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	90% - Rp538.020.900,00	99,17% - Rp592,858,626,00	122,43%

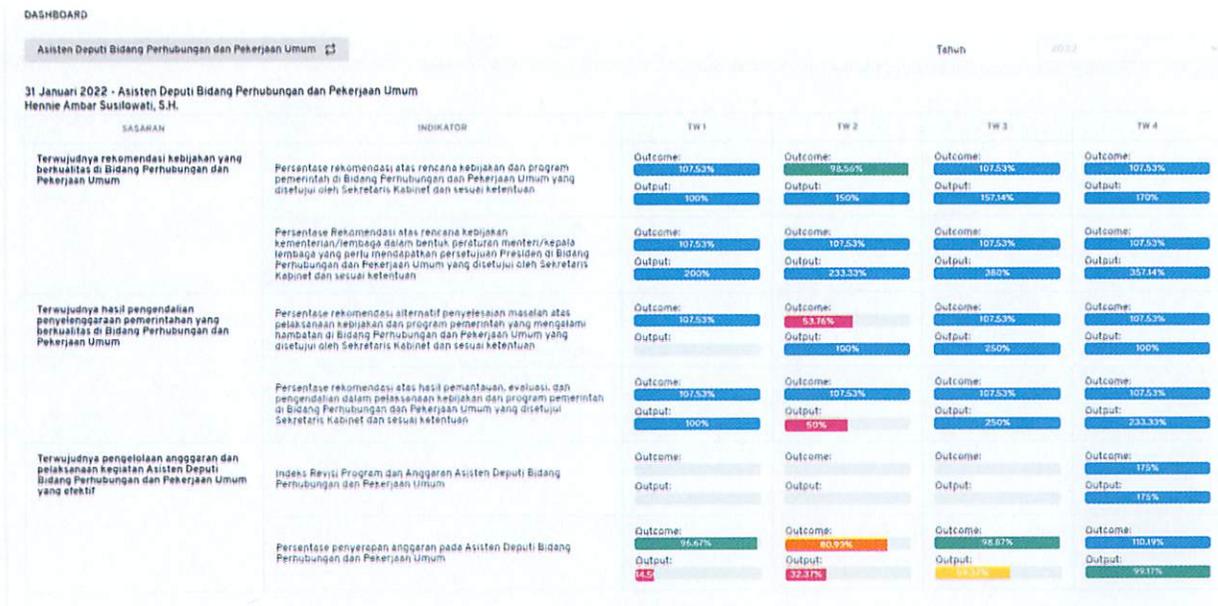
Tabel 10 : Matriks Capaian IRO TA 2022

Indikator Rincian Output (IRO)		TA 2021			TA 2022		
		Target Output	Realisasi Output	Persentase Realisasi Output	Target Output	Realisasi Output	Persentase Realisasi Output
1	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	20	19	95%	20	34	170%
2	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	7	26	371,4%	7	25	357%
3	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan	5	4	80%	5	5	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Indikator Rincian Output (IRO)		TA 2021			TA 2022		
		Target Output	Realisasi Output	Persentase Realisasi Output	Target Output	Realisasi Output	Persentase Realisasi Output
	dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet						
4	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	3	6	200%	3	7	233%
Total Dokumen		35	55		35	59	

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022



Gambar 1 : Tangkapan Layar Dashboard SIKT

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara triwulanan dan berdasarkan Panduan Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet (P4KIN) yang disusun oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, disimpulkan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum secara keseluruhan berada pada predikat “Memuaskan”.

Seperti disampaikan dalam tabel sebelumnya, pada tahun 2022 kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah memenuhi target kinerja, dimana seluruh capaian mencapai angka 107,53%. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga telah menghasilkan 59 Rekomendasi dari target 35 Rekomendasi. Jumlah rekomendasi terbanyak pada rekomendasi terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang membutuhkan Persetujuan Presiden.

1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum

Pada IRO 1 di tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah menghasilkan 34 Rekomendasi dengan berbagai topik/isu. Sebagian contoh rekomendasi IRO 1 sebagai berikut:

Tabel 11 : Matriks Rekomendasi IRO 1

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1.	Peresmian Pengoperasian Terminal Baru Bandar Udara Trunojoyo	<p>Menteri Perhubungan melalui surat Nomor UM.206/1/6 PHB 2022 tanggal 4 April 2022 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan permohonan peresmian pengoperasian terminal baru Bandar Udara Trunojoyo</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>a. Terhadap permohonan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bandar Udara Trunojoyo berlokasi di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur merupakan Bandar Udara kelas III yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2009; 2) Kementerian Perhubungan telah memprogramkan pengembangan Bandar Udara Trunojoyo yang dimulai sejak tahun 2018 dan selesai di tahun 2021; 3) Pengembangan Bandara Trunojoyo meliputi landas pacu 850 m x 23 m menjadi 1.600 m x 30 m yang dapat didarati oleh Pesawat ATR 72, Caravan dan Cessna, pembangunan <i>taxiway</i> 75 m x 15 m, dan pembangunan <i>apron</i> 160 m x 75 m; 4) Luas terminal setelah revitalisasi seluas 3.600 m² dengan konstruksi 2 lantai dengan kapasitas mampu melayani 200.000 penumpang/tahun; 5) Bandar Udara Trunojoyo memiliki rute penerbangan perintis yaitu Sumenep-Harun Tohir, Sumenep-Banyuwangi dan Sumenep-Pulau Pangerungan. <p>b. Usulan permohonan peresmian pengoperasian terminal baru Bandara Trunojoyo perlu dipertimbangkan untuk dihadiri Presiden mengingat tujuan pembangunan Bandar Udara Trunojoyo diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung konektivitas penumpang di wilayah Sumenep, Provinsi Jawa Timur serta mendukung <i>supply</i> logistik dan menjadi <i>tourism hub</i> di wilayah Sumenep dan sekitarnya. Bandara dimaksud juga diharapkan dapat menjadi stimulus kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Madura.</p> <p>Tindaklanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah Bandara Trunojoyo diresmikan oleh Presiden, Maskapai Citilink membuka layanan penerbangan rute Sumenep-Surabaya dan sebaliknya.

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		<p>2. Saat ini terdapat 3 maskapai yang melayani penumpang di Bandara Trunojoyo, yakni : Susi Air (Bawean-Sumenep, Pagerungan-Sumenep, Banyuwangi-Sumenep dan sebaliknya), Wings Air (Surabaya-Sumenep dan sebaliknya), Citilink (Surabaya-Sumenep dan sebaliknya)</p>
2.	Usulan Rapat Terbatas terkait ASEAN Open Sky	<p>1. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri BUMN kepada Presiden Nomor : S-219/MBU/04/2022 tanggal 4 April 2022 hal Permohonan Rapat Internal tentang <i>ASEAN Open Sky Policy</i>, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait <i>ASEAN Open Sky Policy</i> secara <i>hybrid</i> tanggal 8 April 2022 yang dihadiri para pejabat yang mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Sekretariat Kabinet.</p> <p>2. Berdasarkan penjelasan dalam rapat tersebut disepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi akan mengoordinasikan tindak lanjut usulan Kementerian BUMN dengan Kementerian/Lembaga terkait, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian terkait. Akan dilakukan kajian dan evaluasi kebijakan ASEAN Open Sky secara komprehensif dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan diselenggarakan rapat lanjutan guna menindaklanjuti hasil pembahasan rapat koordinasi. <p>3. Arahan Presiden dalam Rapat Internal <i>ASEAN Open Sky Policy</i> tanggal 18 April 2022 dimaksud pada intinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan <i>stakeholder</i> terkait mengkaji dan mempersiapkan maskapai dalam negeri untuk bersaing di pasar penerbangan ASEAN: Presiden menyetujui usulan Menteri Perhubungan untuk menata kembali Bandara Internasional; Menteri BUMN, agar mengidentifikasi dan melaporkan kesiapan Maskapai BUMN kepada Presiden setelah pertengahan Mei 2022. Sehingga sisa slot yang belum terisi dapat diisi oleh maskapai luar negeri dengan skema <i>partnership</i>, sebagai contoh menelaah rencana <i>partnership</i> dengan <i>Emirates/Etihad</i> serta <i>Singapore Airlines</i>. <p>4. Dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden dalam Rapat Internal terkait <i>ASEAN Open Sky Policy</i> tanggal 18 April 2022, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait <i>ASEAN Open Sky Policy</i> tanggal 20 Mei 2022 yang dihadiri para pejabat yang mewakili</p>

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		<p>Kementerian/Lembaga. Dengan kesepakatan rapat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna tindak lanjut Arahan Presiden terkait <i>ASEAN Open Sky Policy</i>. b. Kementerian Perhubungan perlu dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait guna penataan <i>entry point</i>. c. Untuk kajian yang lebih komprehensif, agar diusahakan selesai pada awal Juni 2022. d. Akan diselenggarakan rapat lanjutan guna menindaklanjuti hasil pembahasan rapat koordinasi dan mengundang Kemenko Bidang Perekonomian.
3.	<p>Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Tanggal 24 Mei 2022 tentang Evaluasi Mudik Lebaran</p>	<p>Dalam Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui <i>briefing sheet</i> yang disampaikan melalui memorandum nomor: M.113/MARVES/05/2022 tanggal 24 Mei 2022. Dalam rekomendasi tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan isu, antara lain: evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas, pelaksanaan angkutan penyeberangan, dan sarana dan prasarana non tol.</p> <p>Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada 29 Juni 2022, yang pada intinya menyepakati rencana tindak lanjut dan batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>Rekomendasi: Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Tanggal 24 Mei 2022 tentang Evaluasi Mudik Lebaran yang pada intinya agar seluruh K/L memperhatikan persoalan penumpukan penumpang yang terjadi di Pelabuhan Merak. Selain itu, Presiden juga meminta untuk mengoptimalkan Jalur Lintas Selatan untuk mengatasi kemacetan saat arus mudik lebaran.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terkait Pelabuhan Merak, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kegiatan pemantauan dan beberapa kali rapat membahas tindaklanjut arahan Presiden tersebut. Rapat terakhir kali diselenggarakan pada tanggal 30 September 2022 melalui video conference (nomor surat: 064/D3.03/MARVES/IX/2022 tanggal 27 September 2022). b. Rapat tersebut membahas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan Feasible Study (FS) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, konsep integrasi stasiun yang diusulkan berupa shelter (hanya untuk naik/turun penumpang). 2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah melakukan

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		<p>pemetaan kebutuhan anggaran dan stakeholder yang terkait.</p> <p>3) Terdapat ketimpangan kapasitas antara Pelabuhan Merak (4.526 unit kendaraan) dan Pelabuhan Bakauheni (6.919 unit kendaraan).</p> <p>4) Timeline pengerjaan kegiatan persiapan Natal dan Tahun Baru 2023 serta mudik pada tahun selanjutnya.</p> <p>c. Pada rapat dimaksud, Sekretariat Kabinet menyampaikan agar dibuat jalur khusus truck dari stasiun yang akan diintegrasikan sehingga pengangkutan barang tidak terganggu.</p> <p>d. Kesimpulan rapat:</p> <p>1) Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi akan bersurat kepada Menteri Perhubungan terkait:</p> <p>a) Permohonan mendorong pelaksanaan pengerukan kolam dermaga 1 (layanan eksekutif 2) berdasarkan surat nomor: OP.204/0345/VIII/ASDP-2022 perihal Dukungan untuk Tindak Lanjut Arahan Presiden dan Persiapan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 tanggal 29 Agustus 2022 dan surat nomor: UM.003/0738/VI/ASDP-2021 perihal Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Kolam Dermaga tanggal 30 Juni 2021; dan</p> <p>b) Permohonan optimasi penggunaan sebagian aset yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk peningkatan kapasitas kantong parkir dalam rangka mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan pada periode mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.</p> <p>2) Telah disepakati pengalihfungsian/penataan aset Stasiun Merak yang dikelola oleh PT KAI yang belum terutilisasi di Pelabuhan Merak termasuk jalur kereta api untuk peningkatan kapasitas kendaraan masuk ke Pelabuhan.</p> <p>3) PT ASDP melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pembiayaan di lapangan terkait rencana eksekusi detail persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan melibatkan stakeholder terkait.</p>
4.	Peresmian Pelabuhan Laut Sanur dan Gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai oleh Presiden Republik Indonesia	<p>Menteri Perhubungan kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) dengan surat Nomor UM.206/1/24 Phb 2022 tanggal 3 November 2022 menyampaikan permohonan kesediaan Presiden untuk dapat meresmikan gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut Sanur di Provinsi Bali.</p> <p>Terhadap permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet telah memproses dan menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0320/MARVES/11/2022 tanggal 8 November 2022.</p> <p>Rekomendasi:</p>

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		<p>Rekomendasi dipenuhi untuk diresmikan Presiden.</p> <p>Tindak Lanjut: Telah diresmikan gedung VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Sampalan, dan Pelabuhan Bias Munjul pada tanggal 9 November 2022.</p>
5.	<p>Permohonan Peresmian Jalan Tol Cibitung - Cilincing dan Jalan Tol Serpong - Balaraja</p>	<p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) melalui surat nomor: UM 0603-Mn/1426 tanggal 4 Agustus 2022 menyampaikan permohonan peresmian infrastruktur Jalan Tol Cibitung – Cilincing dan Jalan Tol Serpong – Balaraja.</p> <p>Terhadap surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, Sekretariat Kabinet telah memproses dan menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0207.2/MARVES/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022.</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalan Tol Cibitung – Cilincing dan Jalan Tol Serpong – Balaraja merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan panjang 34,7 km (JalTol Cibitung - Cilincing) dan 39,9 km (JalTol Serpong - Balaraja). Pembangunan kedua proyek jalan tol tersebut didanai oleh skema KPBU dengan masa konsesi selama 40 tahun. Sekretariat Kabinet merekomendasikan Presiden untuk hadir dengan pertimbangan, bahwa kedua proyek jalan tol tersebut merupakan PSN yang sudah berprogres sejak 2018-2019 dan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jabodetabek. <p>Tindak Lanjut: Presiden telah meresmikan kedua proyek jalan tol tersebut pada 20 September 2022.</p>

2. Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum

Selama tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah menerima 35 usulan RPermen. Terhadap 35 RPermen tersebut, setelah dilakukan kajian 4 diantaranya tidak membutuhkan Persetujuan Presiden sedangkan 8 RPermen masih dalam tahap pembahasan (PAK atau harmonisasi). Beberapa RPermen yang diproses:

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 12 : Matriks IRO 2

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1.	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi	<p>a. Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat nomor: HK 202/3/10 PHB 2022 tanggal 30 Maret 2022 menyampaikan permohonan persetujuan atas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi.</p> <p>b. Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0356/SESKAB/04/2022 tanggal 8 April 2022. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0162/Seskab/MARVES/04/2022 tanggal 8 April 2022.</p>
2.	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet	<p>a. Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat nomor: HK 202/2/24 PHB 2022 tanggal 20 April 2022 menyampaikan Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet</p> <p>b. Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0438/Seskab/04/2022 tanggal 25 April 2022. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0198/Seskab/Marves/04/2022 tanggal 25 April 2022</p>
3.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus	<p>a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor: HK 0101-MN/1036, tanggal 23 Mei 2022 menyampaikan permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus</p> <p>b. Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0527/Seskab/05/2022 tanggal 30 Mei 2022. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0239/Seskab/MARVES/05/2022 tanggal 30 Mei 2022</p>

3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum

Pada IRO 3 di tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah menghasilkan 5 Rekomendasi dengan berbagai topik/isu. Sebagian contoh rekomendasi IRO 3 sebagai berikut:

Tabel 13 : Matriks IRO 3

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1.	Informasi Iklim BMKG untuk Kenaikan Suhu dan Perkembangan Iklim	<p>Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kepada Presiden melalui surat No. KL.01.00/008/KB/VII/2022, tanggal 9 Juli 2022 menyampaikan informasi kenaikan suhu secara global dan nasional serta perkembangan iklim berdasarkan hasil pemantauan BMKG.</p> <p>Terhadap surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tersebut, Sekretariat Kabinet telah memproses dan menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0234/MARVES/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022.</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya peningkatan curah hujan di periode musim kemarau seperti di bulan Agustus 2022 disebabkan oleh anomali iklim, antara lain fenomena La Nina Lemah (Weak La Nina), IOD Negatif, dan Suhu Permukaan Laut di sekitar Indonesia yang hangat. Anomali iklim ini masih bertahan dan diperkirakan akan berlanjut setidaknya hingga kuartal III tahun 2022. b. Dampak kenaikan suhu dan perkembangan iklim diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Terjadinya hari tanpa hujan; 2) Peringatan dini kekeringan; 3) Peringatan dini curah hujan tinggi; dan 4) Potensi banjir. c. Sektor sumber daya air: mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air yang berlimpah di tahun La Nina untuk mengisi waduk, bendungan dan daerah-daerah tadah hujan yang minim irigasi, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan. d. Sektor pertanian: meningkatkan kewaspadaan meledaknya hama pengganggu tanaman yang disebabkan oleh kelembaban tinggi pada musim kemarau akibat terjadinya hujan di atas normal. e. Sektor kesehatan: meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang terkait dengan variabilitas iklim pada saat transisi musim seperti DBD, ISPA, dll. f. Sektor kehutanan: tetap mewaspadaai potensi karhutla pada musim kemarau pada wilayah-wilayah yang rentan. g. Perencanaan dan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim:

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		<p>1) Memperkuat kapasitas pemerintah pusat/daerah dalam mengurangi dampak perubahan iklim serta bencana yang ditimbulkannya.</p> <p>2) Mendorong aksi di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta antisipasi bencana hidrometeorologi.</p> <p>3) Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</p> <p>h. Memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim dari laman BMKG.</p> <p>Tindak Lanjut: Menindaklanjuti masukan yang diberikan oleh BMKG dan Sekretariat Kabinet, BMKG telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional bersama Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya guna menyampaikan isu dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi cuaca ekstrem.</p>

4. Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum

Pada IRO 4 di tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah menghasilkan 7 Rekomendasi dengan berbagai topik/isu. Sebagian contoh rekomendasi IRO 4 sebagai berikut:

Tabel 14 : Matriks IRO 4

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Laporan Persiapan Pengoperasian Bandar Udara Halim Perdanakusuma	<p>Menteri Perhubungan melalui surat Nomor UM.105/3/9 Phb 2022 tanggal 23 September 2022 kepada Presiden menyampaikan Permohonan Peresmian Bangunan Gedung VVIP dan VIP Bandar Udara Halim Perdanakusuma.</p> <p>Terhadap surat Menteri Perhubungan tersebut, Sekretariat Kabinet telah memproses dan menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor M.0266/MARVES/09/2022 tanggal 29 September 2022.</p> <p>Rekomendasi: Guna mendukung persiapan pelaksanaan pertemuan negara-negara kelompok G20 yang akan dilaksanakan pada kuartal ketiga tahun 2022, maka perbaikan/revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya untuk mendukung penerimaan tamu-tamu negara (VVIP/VIP) yang melaksanakan lawatan ke Indonesia. Payung hukum untuk melaksanakan revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma adalah berupa Peraturan Presiden.</p>

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		<p>Sekretariat Kabinet beberapa kali terlibat aktif dalam pembahasan Perpres Nomor 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan TNI AU/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemenhub melakukan revitalisasi Bandara HLP yang meliputi: Penyehatan runway dan taxiway, peningkatan kapasitas apron pesawat udara VVIP. b. Renovasi gedung Naratetama dan Naratama (gedung VVIP) dan renovasi bangunan operasi. c. Perbaiki sistem drainase di dalam pangkalan udara/bandar udara.

5. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Semakin sedikit revisi yang diajukan Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP. Adapun capaian Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum terhadap sasaran 3 indikator 1 tahun 2022 adalah 2 kali revisi dengan predikat A (Sangat Baik).

6. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum indikator ini memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan PerDJPB Nomor 5/PB/2022 Pasal 9 ayat 3 persentase target serapan per triwulan sebesar 15%, 50%, 70% dan 90%. Adapun capaian Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum terhadap sasaran 3 indikator 2 tahun 2022 adalah 99,17%.

B. Realisasi Anggaran

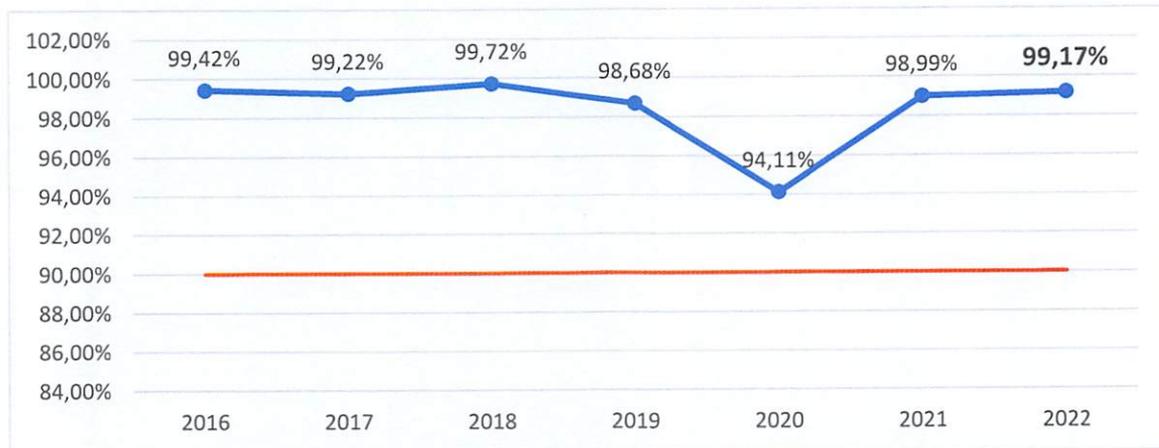
Selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah mengajukan 2 (dua) kali revisi anggaran. Revisi tersebut dilakukan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya *automatic adjustment* anggaran kementerian/lembaga guna menangani pandemi COVID-19 tersebut. Adapun besaran anggaran setiap kegiatan setelah dilakukan revisi adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 15 : Matriks Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output	Anggaran Sesuai DIPA TA 2022	Setelah <i>Automatic Adjustment</i>	Perubahan AA terhadap DIPA TA 2022	Realisasi	% Realisasi
1	Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp462.155.000,00	Rp338.680.000,00	-26,71%	Rp336.831.702,00	99,45%
2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp437.845.000,00	Rp259.121.000,00	-40,81%	Rp256.026.924,00	98,80%
TOTAL		Rp900.000.000,00	Rp597.801.000,00	-33,58%	Rp592.858.626,00	99,17%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022



Gambar 2 : Tren Persentase Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Sekretariat Kabinet Tahun 2022. Dijelaskan pada Tabel 6, besaran pagu anggaran sebesar Rp900.000.000,00, dengan adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan *automatic adjustment* anggaran maka pagu anggaran Asisten Deputi Perhubungan dan Pekerjaan Umum direvisi menjadi Rp597.801.000,00 (turun 33,58%). Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2016 hingga 2021, realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tahun 2022 paling tinggi yaitu sebesar 99,17%. Akan tetapi, perlu menjadi catatan bahwa besaran realisasi tersebut tergolong tinggi karena adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2022 tidak dapat terlaksana dan harus dilaksanakan secara virtual (tidak menggunakan anggaran).

C. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka dalam Laporan Kinerja ini Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum melakukan analisa Evaluasi Kinerja Anggaran² atas Aspek Implementasi³ sebagai salah satu sumber daya yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dan digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

Tabel 16 : Matriks Evaluasi Kinerja

RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Masing-Masing RO	Capaian RO Satker	Alokasi Anggaran Akhir	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran	Efisiensi	
1	Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	27	59	218,52%	181,05%	Rp338.680.000,00	Rp336.831.702,00	99,45%	20,83%*
2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	8	12	150,00%		Rp259.121.000,00	Rp256.026.924,00	98,80%	(Efisien, dengan NE 102,07%)

Berdasarkan penghitungan, diperoleh angka Efisiensi sebesar 20,83% dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dimana angka Efisiensi berada diantara -20% sampai dengan 20%, maka dilakukan penyesuaian melalui Nilai Efisiensi dan diperoleh angka Nilai Efisiensi sebesar 102,07% sehingga dapat disimpulkan digunakan secara efisien.

² Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran

³ Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

BAB IV
Kesimpulan

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum tahun 2022 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas manajemen kabinet di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang tertuang dalam indikator kinerja utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LKj sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Terlebih pada tahun 2022, di Indonesia merupakan masa pemulihan dari pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2019.

Secara umum, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum tahun 2022 sudah sangat baik terlebih ditengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda. COVID-19 menyebabkan dinamika tersendiri yang menjadi pertimbangan besar dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah diagendakan pada awal tahun 2022. Dengan angka realisasi kinerja sebesar 100% (dari target 93%) menjadi bukti bahwa meskipun ada tantangan yang besar, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dapat beradaptasi dan tetap profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Lampiran I : Matriks Capaian Kinerja

Program	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)		
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407) 2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408) 		
Sasaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 		
Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,53%
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,53%
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 %	100 %	107,53%
4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan	93 %	100 %	107,53%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
5. Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	B (5-8 kali revisi)	A (2 kali revisi)	
6. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	90% - Rp538.020.900,00	99,17% - Rp592,858,626,00	122,43%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran II : Matriks Kinerja Anggaran

No.	Rincian Output	Anggaran Sesuai DIPA TA 2022	Setelah <i>Automatic Adjustment</i>	Perubahan AA terhadap DIPA TA 2022	Realisasi	% Realisasi
1	Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp462.155.000,00	Rp338.680.000,00	-26,71%	Rp336.831.702,00	99,45%
2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp437.845.000,00	Rp259.121.000,00	-40,81%	Rp256.026.924,00	98,80%
TOTAL		Rp900.000.000,00	Rp597.801.000,00	-33,58%	Rp592.858.626,00	99,17%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran III : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hennie Ambar Susilowati, S.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



Ir Agustina Murbaningsih, M.Si

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum



Hennie Ambar Susilowati, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM**

No.	Batasan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	<p>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p> <p>Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>93 Persen</p> <p>93 Persen</p>
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	<p>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p> <p>Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>93 Persen</p> <p>93 Persen</p>
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang efektif	<p>Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</p> <p>Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</p>	<p>8 (5-8 kali revisi)</p> <p>90 Persen</p>

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp462.155.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp437.845.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



Ir Agustina Murbaningsih, M.Si

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum



Hennie Ambar Susilowati, S.H.

**FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

No	Pernyataan		Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√

FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
(MEMORANDUM DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR: M.513/ADM/11/2019 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET, ESELON I DAN ESELON II TAHUN 2019)

No	Pernyataan		Checklist
1	BAB I	1. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	√
		2. Menampilkan <i>Dashboard</i> SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	√
2	BAB III	1. Data Perbandingan Capaian Kinerja	√
		2. Analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi). Contoh LKj Sekretariat Kabinet a. <i>Template</i> grafik perbandingan realisasi anggaran b. Tabel capaian kinerja dan anggaran	√
3	Lampiran	<i>Checklist</i> FO sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	√

Kepala Bidang Fasilitasi Operasional
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan
Investasi



Dra. Sarmini, M.H.